LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS

Nomor Assessee : 03

Nama Assessee : ARYATAMA ZWAGERY

Tanggal: 04 OKTOBER 2021

A. Identifikasi Permasalahan:

Birokrat sebagai pengisi lini depan yang selalu berkaitan dengan pelayanan, pengembangan, serta pembinaan bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang mengalami pergeseran paradgima dalam sistem pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan sebuah perubahan sistem dalam badan hukum kepegawaian yang meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian.

Pergeseran paradigma sistem yang dimaksud diatas berkaitan dengan adanya sikap yang tidak sesuai dengan ketentuan etika kepegawaian dalam melaksanakan tugas umum dalam pemerintahan serta pembangunan secara berdaya guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spritual. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga ilmiah menunjukkan bahwa para Pegawai Negeri Sipil lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya dengan menciptakan sebuah prestasi ataupun kinerja yang baik.

Hal seperti diatas sebenarnya sudah sejak lama berlangsung, tidak menjadi hal yang pertama kalinya terjadi, melainkan pada masa Orde Baru pun, wajah Blrokrasi termasuk pegawai sangatlah kental dengan kekuatan politik penguasa dalam sistem korporatisme negara. Sedangkan pada masa Reformasi, pilar birokrasi sangat rawan terhadap intervensi politik sehingga netralitas dan indepedensi PNS mnejadi sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis. Dalam artian bahwa keberhasilan karir pegawai hanyalah bergantung pada relasi serta kedekatan dengan para penguasa yang memimpin saat itu.

Apabila dapat kita bandingkan dengan sekarang ini, jabatan serta tugas dan fungsi dari para pegawai yang ada tidaklah sesuia dengan latar belakang yang ditempuh, salah satu contohnya adalah banyak saat ini pegawai yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang yang ditempuhnya, secara harfiahnya ketika kita dapat melihat seorang pegawai negeri sipil yang berlatar belakang pendidikan terakhirnya adalah pendidikan jasmani, beliau dapat menduduki jabatan struktrual yang ada di salah satu dinas yang ada di wilayah tersebut, dapat kita ilustrasikan adalah Dinas Pelayanan Masyarakat Terpadu Satu Pintu. Hal

ini sangatlah memprihatinkan sebab, lintas latar belakang pun dapat di sesuaikan apabiila kita memiliki kedekatan dengan penguasa yang menjabat saat itu.

Kondisi demikian yang mendorong perilaku PNS sekarang ini apabila masih saja memiliki pemikiran seperti ilustrasi diatas dapat menimbulkan pemikiran bahwa bekerja hanya untuk penguasa bukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan, dari hal tersebut pula timbul rasa malas, serta sikap kecenderungan mencari muka kepada atasan agar mendapatkan jabatan yang diinginkan. Bentuk praktis yang diterapkan pada pegawai dapat menurunkan semangat pegawai lain dalam menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang tumbuh dalam diri PNS. Produktivitas PNS pun akan menjadi sebuah pertanyaan bagi masyarakat luas dan sasaran kerja pun menjadi tidak tercapai.

B. Isu Permaslahan

Rekrutmen

Proses rekrutmen yang sangat disoroti saat ini adalah adanya lelang jabatan yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang berjalan di lapangan, dalam artian bahwa adanya peran peran secara internal yang tidak diketahui secara umum yang dapat mempengaruhi peluang seorang untuk menduduki jabatan yang di lelang

- Status Pegawai yang bergantung pada kebijakan penguasa yang menduduki di wilayah tersebut
- Sanksi yang kurang diberikan kepada pegawai yang cenderung indisipliner dalam menjalankan tugas serta fungsi yang bersangkutan
- Produktivitas dalam menggunakan waktu kerja yang efektif serta optimalisasi dalam mencapai target yang telah ditentukan.